

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendidikan politik yang mengandung kesatuan antara dimensi ideal dan dimensi *manifest* prinsip berpancasila adalah pendidikan politik yang tergambar dalam perilaku "nyunda". Pendidikan politik ditujukan agar masyarakat berpartisipasi politik dalam pembangunan. Pendidikan yang diselenggarakan bersifat non formal baik melalui peristiwa yang ditujukan untuk mendorong masyarakat agar terlibat dalam upaya mengimplementasikan budaya Sunda maupun kebijakannya untuk mendorong kemandirian. Temuan penelitian adalah perilaku memilih pemimpin masyarakat Purwakarta merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik yang melekat pada diri pemilih baik secara rasional atau pun irasional. Sebagian besar masyarakat Purwakarta tidak mempersoalkan pemimpinnya menggunakan gaya atau landasan filosofi Sunda. Masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari terutama masalah ekonomi. Secara umum kepemimpinan Sunda dalam upaya pendidikan politik dipraktekan secara non formal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa:

1. Sikap kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik Bupati Purwakarta memiliki sikap positif terhadap pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari upayanya untuk membangunkemandirian ekonomi, mendorong kebanggaan identitas sebagai orang Sunda, kewajiban untuk meningkatkan produktivitas dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal serta bagipemilih pemula agar memilih karena alasan rasional. Dengan menggunakan pola kepemimpinan transformasional Bupati Purwakarta mentransformasikan nilai-nilai kesundaan pada masyarakat Purwakarta sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Dengan pola kepemimpinan

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2014

MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
(STUDI KASUS BUPATI PURWAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

transformational Dedi Mulyadi mampu mempengaruhi, menginspirasi serta memotivasi masyarakat Purwakarta untuk menjaga dan melestarikan budaya Sunda yang merupakan ciri dari kepemimpinan Sunda.

2. Kredibilitas kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik yang diperankan oleh Bupati Purwakarta bahwa Bupati ini memiliki kredibilitas untuk mendorong pendidikan politik bagi warganya. Proses transformasi nilai-nilai kesundaan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi menguatkan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin Sunda di mata masyarakat. Karakteristik sebagai pemimpin yang *pésok* (memikat hati atau eueus/bangga), mampu memikat hati bawahannya dan merupakan kebanggaan juga bagi bawahannya terutama orang Sunda. Bupati ini memiliki jiwa *upruruk* (membujuk dan menentramkan hati). Dengan kredibilitas yang dimilikinya, masyarakat percaya bahwa Dedi Mulyadi dapat mendorong pendidikan politik bagi warganya terutama kesadaran pada warganya untuk mengimplementasikan budaya Sunda dan membangun kemandirian dengan kembali ke alam.
3. Konsistensi kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta memperlihatkan bahwa Bupati Purwakarta memiliki konsistensi dalam mendorong pendidikan politik masyarakat Purwakarta dengan menggunakan nilai-nilai kesundaan. Upaya membangun karakter bangsa yang berbudaya Sunda diwujudkan dengan secara konsisten menampilkan simbol-simbol Sunda baik dalam keseharian maupun kebijakannya. Dedi Mulyadi mentransformasikan nilai-nilai kesundaan secara konsisten kepada masyarakat Purwakarta sebagai bagian dari pendidikan politik.
4. Visi dan misi serta tujuan kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik yang dirumuskan oleh Bupati Purwakarta bersama para *stakeholder* menggambarkan bahwa visi Bupati Purwakarta untuk mendorong kemandirian serta tanggung jawab melestarikan budaya Sunda serta mengimplementasikannya dalam kehidupannya tercermin dalam visinya yaitu “Purwakarta Berkarakter”.

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2014

MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
(STUDI KASUS BUPATI PURWAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gunamenjalankanvisidanmisinyadalampendidikanpolitikbupatimemilikikecen derunganuntukberperilakutransendingtotaliterdan otoriter terutamaadalammengimplementasikangagasan, ide,danpemikiran yang berlandaskannilai-nilaiSundakepadamasyarakat. Hal iniditujukan agar masyarakatmelihatbuktikebenaranfilosofitersebutkemudiantumbuhkesadarann yatentangkemandirian, budayaSunda, hak,dankewajibannyasebagaiwarganegara.

B. Saran

1. Gunamendorongkeberhasilanpendidikanpolitikmakapendidikanpolitikperlu diformalkanterutamapadakelompokpemilihpemula agar masyarakat terdidik secara politik.Sedangkanupayauntukmendorongkesadaranmengenaihak dan kewajibansebagaiwarganegara yang harusmengimplementasikanfilosofi yang bersumberpadabudayabangsadilakukansecara non formal baikmelalui program budayamaupunperistiwabudaya.
2. Mengingatpentingnyapendidikanpolitikbagimasyarakat,makasebagaikepal adarahseyogyanyadapatmendorongpendidikanpolitik secara lebih intensif yang diselenggarakanolehpartaimaupunpihak-pihakterkait. Pendidikan politik yang dilakukan oleh kepala daerah atau pun pihak-pihak terkait porsidan caranya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan dilakukan dengan cara-cara terdidik. Agaramasyarakat tertarik dan tidak kebingungan dalam menerima pendidikan politik yang diselenggarakan serta dapat menghapus anggapan yang selama ini ada di masyarakat bahwa “politik itu jahat”.
3. Pendidikan politik harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Karena pendidikan politik itu bukan hanya terletak pada aspek milih-memilih namun lebih dari itu. Pendidikan politik mencakup segala aspek kehidupan. Pendidikan politik yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik yang terdidik secara politik.

4. Proses perwujudan visi, misi serta tujuan, dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta seharusnya tetap melibatkan dan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Jangan langsung diterapkan meskipun pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat, Bupati Purwakarta harus melakukan sosialisasi dan pengkajian terlebih dahulu sebelum diterapkannya sebuah kebijakan, karena hal itu merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.